



Banggar Nilai Terlalu Rendah

Target PAD 2016 Rp 90,5 Miliar



Dewa Gde Oka

Bali Post/Inf

Bangli (Bali Post) -

Target pendapatan asli daerah (PAD) yang dipasang pihak eksekutif untuk tahun 2016 dinilai masih terlalu rendah oleh Badan Anggaran (Banggar) DPRD Bangli. Dimana saat ini pihak eksekutif hanya menarget PAD pada angka Rp 90,5 miliar. Banggar meminta target PAD yang dipasang bisa ditingkatkan lagi hingga di atas Rp 100 miliar.

“Target PAD tahun 2015 yang dipasang Rp 82 miliar. Saat ini Rp 90,5 miliar. Memang ada peningkatan Rp 8,5 miliar. Tapi sedikit sekali kenaikannya. Saya kira pihak eksekutif hanya asal naikan saja,” kata anggota DPRD Bangli Dewa Gde Oka usai mengikuti rapat Banggar bersama TAPD di ruang rapat DPRD Bangli, Selasa (17/11) kemarin.

Menurut Dewa Gde Oka, seharusnya pihak eksekutif bisa memasang target PAD lebih tinggi hingga di atas Rp 100 miliar. Hal ini mengingat potensi PAD yang dimiliki Bangli

masih cukup besar dibanding target yang dipatok eksekutif. Politisi Partai Gerindra ini mengatakan, adapun potensi PAD yang masih bisa dioptimalkan salah satunya adalah pendapatan dari sektor pariwisata, yakni retribusi masuk ke Kintamani.

Dia menilai selama ini pendapatan retribusi kawasan wisata Kintamani banyak mengalami kebocoran akibat adanya ulah nakal oknum petugas pungut karcis. Menurut Dewa Oka, salah satu cara untuk memaksimalkan potensi tersebut yakni dengan meningkatkan

pengawasan terhadap pemungutan karcis guna menekan adanya kebocoran. “Caranya mengoptimalkan tentu dengan menekan kebocoran. Ini sudah terbukti pascadewan melakukan sidak di sana pendapatan dari sektor itu meningkat,” terangnya.

Selain itu, potensi pendapatan lainnya yang menurutnya masih bisa digali untuk meningkatkan pendapatan adalah pajak hotel dan restoran (PHR), yang selama ini banyak ditung-gak oleh sejumlah pengusaha hotel dan restoran di Kintamani. (kmb40)

Edisi : Rabu, 18 November 2015

Hal : 8



Di Balik Banyaknya Keluhan PDAM Gianyar Perlu Biaya Perbaikan Rp 60 Miliar Bayar Utang Rp 23 Miliar,

MASYARAKAT Gianyar memang sering menyampaikan keluhan macetnya aliran air PDAM Gianyar. Ternyata di balik kurangnya pelayanan tersebut, PDAM Gianyar harus membayar utang sebesar Rp 23 miliar selama 20 tahun. Meski utang tersebut sudah terlunasi pada 2013, kini PDAM tetap kesulitan berinvestasi karena harus melakukan perbaikan akibat kebocoran di 47 titik. Biaya investasi dan perbaikan yang dibutuhkan mencapai Rp 60 miliar.

Dirut PDAM Gianyar, Ir. Made Sastra Kencana, Selasa (17/11) kemarin, menerangkan, mulai 1993 PDAM Kabupaten Gianyar mengupayakan pendanaan melalui Departemen Keuangan yang bersumber dari pinjaman luar negeri. "Dana ini digunakan untuk pengembangan infrastruktur dan menambah cakupan pelayanan, dengan total pinjaman dan

bunga PDAM saat itu mencapai 23 miliar lebih," ungkapnya.

Dari pinjaman tersebut PDAM Gianyar akhirnya bisa memanfaatkan sumber air baku yang berasal dari 4 mata air gravitasi (MAG), 11 mata air pompa (MAP), dan 40 sumur bor dengan total kapasitas produksi 749 liter/detik.

Namun, beban pinjaman ini memberikan dampak terhadap kinerja keuangan PDAM Gianyar. Sehingga untuk menjaga kesehatan kinerja keuangan, PDAM mengikuti program restrukturisasi utang. "Hingga pada 2008, dilakukan amandemen terhadap utang PDAM yang tertunda ini, menjadi 13,069 miliar lebih, terdiri dari utang pokok sebesar 6,617 miliar lebih dan utang nonpokok 6,452 miliar lebih," ujarnya.

Memasuki 2009, PDAM menaikkan tarif dari Rp 1.300/M3 menjadi Rp 1.700/M3. Hal ini dilakukan untuk menunjang

pembelian air curah yang setiap tahun meningkat 7 %, serta untuk memenuhi komponen biaya operasional antara lain kenaikan biaya listrik, dan biaya bahan bakar serta biaya pemeliharaan dan biaya operasi lainnya.

"Tapi sampai 2015, tarif PDAM Gianyar masih tetap Rp 1.700/M3, meskipun harga pokok produksi rata-rata mencapai Rp 2.900 dengan jumlah pelanggan yang dilayani PDAM Gianyar sebanyak 53.859 sambungan rumah per Oktober 2015. Jadi dari harga itu, PDAM sebenarnya sudah mensubsidi pelanggan pemakaian airnya 10 kubik dengan jumlah rata-rata sekitar 20 % dari total pelanggan itu," ujar Sastra Kencana.

Dia melanjutkan, pada 2012, Pemkab Gianyar mengambil kebijakan untuk mengatasi permasalahan utang yang bergulir sejak 1993 tersebut. Salah

satunya dengan menyelesaikan sisa kewajiban utang pokok PDAM sebesar Rp 2,6 miliar lebih, membayar utang kepada pihak swasta sebesar Rp 4,239 miliar lebih dan utang lancar lainnya sebesar Rp 2,3 miliar lebih. Hingga akhirnya, utang pokok PDAM dapat diselesaikan pada 2013. Di samping itu, PDAM sudah menyetujui Surat Keputusan Menteri Keuangan No.: 805 tahun 2015 tentang Hutang Non-Pokok sebesar Rp 6,452 miliar lebih yang sudah dihapuskan secara mutlak setelah PDAM Kabupaten Gianyar bisa memenuhi 8 indikator persyaratan kelulusan *business plan*.

Meski utang sudah lunas, Sastra Kencana mengakui, PDAM tidak bisa langsung melakukan investasi, karena fokus memperbaiki pelayanan, serta meminimalisasi tingkat kehilangan air yang cukup tinggi yakni mencapai 47 % (ad1960)



Ir. Made Sastra Kencana

Edisi : Rabu, 18 November 2015

Hal : 9



Dugaan Pemerasan CPNS DKP Tabanan

Hakim Nilai Ada Saksi Berbohong

Mangupura (Bali Post) -

Terkait kasus dugaan pemerasan terhadap CPNS di DKP Tabanan, sebagaimana dalam dakwaan jaksa, Selasa (16/11) kemarin dilakukan pemeriksaan delapan orang saksi. Mereka adalah Sekertaris DKP Tabanan Wayan Sukantrayasa, staf kepegawaian Sarinah, dan enam saksi lainnya yang diduga menjadi korban dalam perkara ini.

Sidang hingga petang kemarin, ketua majelis hakim Acmad Peten Sili, Gede Haryadi didampingi hakim ad hoc Sumali, sempat melakukan konfrontir karena ada dugaan saksi yang berbohong. Saksi yang

dikonfrontir adalah Sarinah dengan tujuh saksi korban yang mengaku disuruh menyelesaikan administrasi Rp 60 juta sebelum menerima SK CPNS dan PNS. Namun, Sarinah dengan tegas membantahnya. "Kalau menerima telepon pernah, tapi tidak ngomong masalah bayar administrasi pada Pak De (Jagrem - red)," bantah Sarinah.

Namun ketujuh saksi tetap menyebutkan bahwa Sarinah sempat mengatakan hal itu. Selain itu, saksi korban mengaku SK CPNS dan PNS yang sudah keluar sempat ditahan karena belum menyelesaikan administrasi. Sementara yang sudah bayar, SK-nya langsung diberikan.

"Kalian sudah disumpah. Urusan kalian dengan Tuhan. Kalaupun itu *cicik*, bisa dirasakan sekarang atau nanti," tandas hakim. Namun saksi ini tetap pada pendirian, sehingga perbedaan antarsaksi pun dibiarkan.

Petang kemarin, Sekretaris DKP Tabanan Sukantrayasa mengaku baru mengetahui adanya kasus dugaan pemerasan dari media massa. Ia mengatakan sempat menanyakan masalah tersebut kepada Candra Dewi. "Saya sempat tanya, apakah benar ada SK yang ditahan. Tetapi, Candra Dewi bilang ada SK yang belum turun dari BKD," jelasnya. (kmb37)



Terkait Rencana Reklamasi Teluk Benoa

PHDI Mesti Pakai

Kajian Sastra

Hindu

Mangupura (Bali Post) -

Tim 9 Parisada Hindu Dharma Indonesia (PHDI) diminta memakai kajian sastra Hindu dalam menyikapi berbagai hal terkait penyelamatan Bali. Terutama, terkait rencana reklamasi Teluk Benoa, KSPN Besakih, Gunung Agung dan sekitarnya, KSPN Taman Nasional Bali Barat, Pulau Menjangan dan sekitarnya, serta rencana geothermal di Bedugul.

"*Titiang nunas ampura lan nunas ping banget majeng ratu sulinggih mangda* (saya mohon maaf dan mohon dengan sangat dihadapan para sulinggih agar - red) benar-benar memakai kajian sastra Hindu, *local genius, local wisdom*, dan lain-lain yang berlaku di Bali, yang merupakan warisan leluhur yang adiluhung," pinta akademisi Universitas Udayana

(Unud) Drs. Ec. I Putu Anom, B.Sc., M.Par. di Denpasar, Selasa (17/11) kemarin.

Mantan Dekan Fakultas Pariwisata ini meminta Tim 9 PHDI untuk tidak melakukan investigasi. Melainkan, menggalikan masukan dari akademisi dan pakar sesuai bidangnya. Bisa juga menjangkau aspirasi dari tokoh-tokoh masyarakat, baik pendeta, mantan pejabat,

serta masyarakat terutama yang terdampak dari suatu kegiatan megaproyek.

"Kami mohon jangan melakukan investigasi. *Bhisama* PHDI harus tegas, jelas, dan terukur. *Bhisama* PHDI tidak boleh hanya normatif atau umum saja, karena akan memunculkan multitafsir dari berbagai pihak sesuai kepentingannya masing-masing, tetapi harus diturunkan secara detail. Contohnya, bagaimana tentang reklamasi Teluk Benoa, KSPN Besakih, geothermal, dalam *bhisama* harus jelas, tegas," tandas Anom yang juga Ketua Ikatan Cendekiawan Pariwisata Nasional (ICPI) wilayah Bali ini.

Sebelumnya diberitakan, Ketua Tim 9 PHDI Ida Pandita Mpu Jaya Arcayananda mengaku pihaknya belum mengeluarkan keputusan apa pun, khususnya terkait pembangunan di kawasan Teluk Benoa. Saat ini pihaknya masih melakukan investigasi agar apa yang dihasilkan tidak salah. "Kita belum membuat hasil apa-apa. Kita masih investigasi. Karena ini masalah pelik, satu ada unsur politik, dan ada unsur yustisia (hukum). Kita sebagai lembaga agama melihat suatu masalah harus dari kajian agama. Kita bukar bersifat eksekutor, legislator, katanya. (kmb32)

Edisi : Rabu, 18 November 2015

Hal : 3